KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Pertimbangkan Tunda Ketok Palu Revisi RKUHP
Tanggal : Minggu, 22 September 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Pertimbangkan Tunda Ketok Palu Revisi RKUHP

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo agar DPR menunda pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mendapat dukungan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan penundaan pengesahan RKUHP dirasa perlu, mengingat apa yang dihasilkan dari RKUHP sangat strategis dan menjadi pondasi di dalam seluruh sistem hukum pidana tersebut.

"Oleh karena itu kami PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya karena sejak awal kami mendengarkan aspirasi itu," ungkap Hasto saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/9).

Selain itu, kata Hasto, PDI Perjuangan sebelumnya juga sudah memberikan masukan kepada Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

"Pagi tadi kami berkomunikasi dengan bapak Mensesneg sebagai kepemimpinan yang terus mendengarkan aspirasi rakyat dan juga mencermati berbagai dinamika yang ada," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut keputusan Jokowi itu juga sudah sesuai dengan hasil koordinasi dari seluruh partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). "Akhirnya Presiden Jokowi menunda pengesahan dari RKUHP tersebut sambil terus berdialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Keputusan itu dia ambil setelah mencermati masukan-masukan dari beberapa kalangan.

"Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama. Dan setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi-substansi RUU KUHP, masih ada materi butuh pendalaman lebih lanjut," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (20/9).

Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikapnya kepada DPR. "Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahan tidak dilakukan DPR periode ini," tegasnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU KUHP di Sidang Paripurna yang telah dijadwalkan, Selasa (24/9) mendatang. Selain mendengarkan permintaan pemerintah, penundaan pengesahan membuktikan DPR mendengar dan memperhatikan kehendak masyarakat.

"Semua fraksi di DPR saya yakin akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat. Saya sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk membahas penundaan itu, Senin (23/9) mendatang dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus," ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo saat membuka Diskusi Publik 'Merawat Golkar sebagai Rumah Besar Kebangsaan', di Jakarta, kemarin.

Diketahui, pengambilan keputusan tingkat I sudah dilakukan DPR bersama-sama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM. Rencananya, pengesahan RUU KUHP dilakukan dalam sidang paripurna, Selasa (24/9).

Melanjutkan keterangannya, Bamsoet menuturkan, jika pada rapat Bamus tanggal 23 September mendatang para pimpinan fraksi setuju menunda, DPR akan kembali membahas pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial. Pimpinan DPR sudah menerima masukan dari perwakilan mahasiswa yang berdemo di depan DPR terkait penyempurnaan RUU KUHP. ■ ONI